

TINJAUAN LITERATUR PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Oleh :

Putri Pratama¹⁾, Isra Maulina²⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
email: putripratama4487@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
email: isramaulina@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak

Studi ini secara sistematis mengevaluasi kemajuan akuntansi di sektor publik dalam manajemen keuangan daerah di Indonesia, dengan fokus pada tantangan utama seperti kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Perubahan sistem akuntansi dari metode kas ke akrual dengan mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi langkah krusial dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dinamika, tantangan, dan peluang yang terkait dengan penerapan akuntansi sektor publik di level pemerintahan daerah, serta untuk mengidentifikasi kekurangan dalam literatur mengenai integrasi keberlanjutan dan digitalisasi. Metode penelitian yang diterapkan adalah tinjauan literatur sistematis terhadap penelitian di tingkat nasional dan internasional selama sepuluh tahun terakhir (2013-2023), disertai dengan analisis dokumen kebijakan dan laporan audit. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan SAP akrual telah meningkatkan kualitas informasi keuangan dan akuntabilitas publik, tetapi masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, serta penolakan dari birokrasi. Selain itu, penggunaan akuntansi publik sebagai alat manajemen dan strategi pembangunan daerah masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini menggarisbawahi peningkatan pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai melalui peningkatan pelaporan yang berpusat pada kinerja dan keberlanjutan, pengintegrasian teknologi informasi, serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, SAP Akrual, Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi

1. PENDAHULUAN

Dalam hal pengelolaan anggaran negara bagian dan daerah, akuntansi sektor publik memainkan peran penting, khususnya dalam mendorong keterbukaan dan tanggung jawab. Fungsi akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu indikator keberhasilan dalam layanan publik adalah seberapa mudah akses terhadap pelayanan tersebut (Karlina, Lewaru, and Kriswantini, 2023). Akuntansi sektor publik dapat dipahami sebagai kegiatan jasa yang mencakup pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan dari peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu, serta relevan untuk pengelolaan dana publik di lembaga pemerintah tingkat tinggi dan departemen yang ada di

bawahnya (Putri and Retnosari, 2023)

Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan meningkatnya permintaan publik akan pengelolaan keuangan yang lebih baik, akuntansi publik di Indonesia telah mengalami beberapa transformasi dan adaptasi. Akuntansi sektor publik dapat berubah karena sejumlah faktor, termasuk arus informasi yang bebas dan perkembangan teknologi. Akuntan publik dapat mengantisipasi bahwa teknologi baru akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan proses akuntansi, dan bahwa data yang dihasilkan akan lebih andal (Shafitri et al. 2025). Era komputerisasi memberikan perspektif baru dalam hal pembukuan, di mana kemajuan mekanis dianggap sesuai untuk mendukung tugas-tugas penting dalam akuntansi demi menyelesaikan berbagai kegiatan pembukuan yang krusial bagi organisasi (Khafifah et al. 2020).

Masalah keterbukaan dan tanggung jawab dalam mengelola uang publik merupakan hal yang

umum. Banyaknya kasus penyalahgunaan dana dan perilaku tidak etis yang terungkap menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memadai. Aset dan kewajiban pemerintah yang tidak efisien dan dikelola dengan buruk merupakan hal yang umum. Tidak adanya pencatatan aset secara berkala menyebabkan penilaian aset menjadi tidak akurat. Data yang menyesatkan dalam laporan keuangan dapat muncul dari hal ini.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang membahas keuangan negara dan menekankan perlunya administrasi keuangan negara yang transparan dan akuntabel, mulai memberikan perhatian besar terhadap peningkatan akuntansi di sektor publik Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang mencakup konsep akuntansi berbasis akrual, merupakan faktor lain yang mendorong perubahan dalam akuntansi sektor publik. Tujuan penggunaan SAP adalah untuk meningkatkan keakuratan laporan keuangan pemerintah di tingkat federal dan negara bagian serta untuk merampingkan dan meningkatkan administrasi dana publik. Laporan keuangan untuk lembaga federal dan negara bagian disiapkan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tata kelola yang baik mampu menjalankan kewajiban administratifnya sejalan dengan cita-cita keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi, yang merupakan tujuan lain dari SAP, (Yogi Pranata, 2024)

Meskipun ada beberapa perkembangan positif, akuntansi publik di Indonesia masih dalam tahap awal dan menghadapi beberapa tantangan. Ketimpangan dalam ketersediaan profesional akuntansi yang berkualifikasi, pendanaan yang tidak memadai untuk peningkatan infrastruktur TI, dan penolakan terhadap perubahan di berbagai tingkat pemerintahan merupakan beberapa tantangan yang paling signifikan. Untuk mencapai

tujuan penerapan akuntansi publik secara efektif, penting untuk mengidentifikasi semua tantangan ini dan mencari solusinya. Penelitian yang mengambil sikap budaya terhadap akuntansi merupakan masalah lain yang muncul. Akuntansi di Indonesia, menurut laporan tersebut, didasarkan pada prinsip-prinsip Barat, yang bertentangan dengan identitas unik negara tersebut (Briando, 2021). Penelitian lain juga menyatakan bahwa praktik akuntansi hanya berfokus pada tujuan nominal dalam mata uang rupiah semata (Martadinata, 2023)

2. METODE PENELITIAN

Untuk menyelidiki bagaimana akuntansi sektor publik telah berkembang dalam kaitannya dengan manajemen keuangan daerah, penelitian ini menggabungkan strategi kualitatif dengan metodologi tinjauan pustaka sistematis. Tinjauan ini menghimpun dan menganalisis temuan penelitian yang relevan dari dekade terakhir. (2013–2023) dilakukan. Dengan mengambil pendekatan ini, kami ingin lebih memahami kecenderungan, kesulitan, dan potensi keuntungan yang terkait dengan penerapan akuntansi sektor publik pada pemerintahan kota.

Makalah penelitian dari publikasi nasional (SINTA) dan internasional (Scopus) yang disegani digunakan sebagai data penelitian ini, serta dokumen-dokumen kebijakan seperti peraturan pemerintah dan laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses identifikasi literatur dilakukan dengan memanfaatkan kata kunci seperti “akuntansi sektor publik,” “SAP berbasis akrual,” “pengelolaan keuangan daerah,” “transparansi fiskal,” dan “akuntabilitas publik,” yang dicari melalui database jurnal dan portal publikasi resmi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Gurendrawati et al. 2024) Akuntansi di sektor publik berfungsi sebagai sumber

informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menjalankan manajemen serta bagi masyarakat luas. Akuntansi di sektor ini sangat terkait dengan implementasi dan pendekatan akuntansi dalam ruang lingkup publik. Dibandingkan dengan sektor swasta, sektor publik mencakup berbagai kegiatan yang lebih luas dan lebih rumit. Baik keragaman entitas yang membentuk sektor publik maupun kerumitan faktor eksternal yang memengaruhinya berkontribusi pada luasnya ranah publik. (Jupri Berutu, Pranata, and Yetri, 2022) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai suatu kerangka kerja penerapan prinsip, prosedur, dan analisis akuntansi secara sistematis terhadap administrasi keuangan publik oleh lembaga negara dan badan terkait. Sementara itu, menurut (Basri, 2021), Istilah "akuntansi sektor publik" mengacu pada praktik pencatatan keuangan untuk entitas yang menangani kepentingan publik, seperti lembaga pemerintah, lembaga nirlaba, dan lembaga pendidikan.

Akuntansi di sektor publik tidak hanya mencakup lembaga pemerintah tetapi juga berbagai jenis lembaga nirlaba. Untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak masyarakat, organisasi di sektor publik berupaya menawarkan komoditas dan layanan yang dikenal sebagai barang publik. Terlepas dari kenyataan bahwa sektor swasta juga terlibat dalam manufaktur dan penyediaan layanan, harus ditekankan bahwa beberapa tugas, seperti birokrasi pemerintah, secara eksklusif merupakan ranah sektor publik.

Salah satu kendala bagi organisasi yang menerapkan akuntansi di sektor publik adalah pemanfaatan uang publik. Dalam (Kewo, 2024) Istilah "akuntansi sektor publik" digunakan untuk menggambarkan berbagai macam kegiatan di dalam pemerintahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: yayasan, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, partai politik, dan pemerintah daerah dan nasional. Karena perusahaan sektor publik

bergantung pada pendanaan publik untuk operasi mereka, transparansi tentang bagaimana uang tersebut digunakan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki catatan keuangan yang dapat dipercaya dan terbuka.

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Amanat UUD 1945 mengenai pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan profesionalisme, keterbukaan, dan tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desentralisasi membawa perubahan pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Sebelumnya, pengelolaan keuangan negara terpusat di pemerintah pusat tanpa memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah, namun setelah desentralisasi, hak daerah untuk mengelola keuangannya sendiri semakin meningkat. Selain itu, terjadi pergeseran fungsi pelaporan keuangan dari sekadar administratif menjadi akuntabilitas sejak tahun 2000 (Kewo, 2024).

Akuntabilitas dan kebutuhan akan pengelolaan keuangan pemerintah yang terbuka merupakan kekuatan pendorong di balik perubahan dalam peran pelaporan keuangan. Evolusi akuntansi di sektor publik Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga fase berbeda (Martadinata, 2024)

a. Era Prareformasi (sebelum otonomi daerah)

Pengelolaan keuangan di Indonesia tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa kolonial bahkan setelah negara ini merdeka pada tahun 1945. Unsur utama dari sistem ini adalah bahwa penyusunan APBD dilakukan oleh DPRD dan kepala daerah secara bersama-sama, namun laporan akhirnya disampaikan kepada pemerintah tingkat yang lebih tinggi. Penyusunan APBD dilakukan berdasarkan kategori penerimaan dan pengeluaran, yang bertujuan untuk mengawasi setiap pengeluaran yang dilakukan.

b. Era (pasca)-reformasi (era otonomi daerah) periode 1999-2004

Pemisahan antara peran legislatif DPRD dan peran eksekutif kepala daerah merupakan konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah. Jadi, dalam hal pengelolaan keuangan, tugas kepala daerah adalah mengawasi keuangan daerah dan melaporkannya kepada DPRD. Sebagai bagian dari proses penyusunan APBD, masyarakat harus dilibatkan dalam pendekatan kinerja yang melihat baik realisasi belanja maupun hasil dan dampak dari program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, pemerintah wajib menerapkan konsep nilai untuk uang. Begitu juga dalam pengelolaan sistem akuntansi keuangan, telah terjadi perubahan dari pencatatan yang berbasis kas menjadi akuntansi berbasis kas yang dimodifikasi.

c. Era Pasca-reformasi Lanjutan periode 2004-sekarang

Kerangka APBD dan penganggaran yang berfokus pada kinerja disempurnakan selama periode ini, dengan yang terakhir mendapat perhatian khusus karena menggabungkan persyaratan akuntansi pemerintah. Ada juga pemisahan antara bendahara pendapatan dan bendahara pengeluaran selama era ini. Selain itu, laporan keuangan daerah mulai disiapkan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki kemampuan dan efektivitas dalam menjalankan administrasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemerintah daerah sering kali belum menjalankan tugas dan fungsi dengan efisien, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Situasi ini timbul karena metode umum yang diterapkan dalam penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap kegiatan adalah pendekatan bertahap, yang didasari oleh

perubahan satu atau beberapa variabel umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk (Halim, 2012:23).

Menurut Halim (2012:59), manajemen keuangan daerah perlu berlandaskan pada prinsip ekonomis, efisiensi, dan kinerja yang efektif. Sumber daya keuangan yang terbatas harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memaksimalkan potensi nyata daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas serta kebutuhan masyarakat. Halim (2012:24) menegaskan bahwa pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aspek proses, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pencatatan dan pelaporan.

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, sehat secara ekonomi, transparan, dan bertanggung jawab yang memperhatikan kewajaran, kesopanan, dan kemanfaatan masyarakat diamanatkan oleh UU No. 33 Tahun 2004, pasal 66 ayat 1. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan daerah digunakan konsep tata kelola yang baik dan gagasan *value for money*, yang didasarkan pada strategi kinerja yang mengutamakan hasil. Beberapa rasio, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan, dapat dihitung dengan menggunakan data keuangan dari APBD (Halim, 2008:268).

Peran akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah

Akuntansi Sektor Publik memiliki peranan yang krusial dalam pengelolaan finansial daerah dengan meningkatkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemakaian anggaran publik. Melalui akuntansi sektor publik, pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan yang tepat dan mudah dimengerti, serta menyampaikan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan keuangan. Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Peningkatan Transparansi

Laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan norma akuntansi sektor publik menyajikan informasi yang jelas mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban pemerintah daerah. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana anggaran publik digunakan, sehingga kepercayaan kepada pemerintah dapat meningkat.

2. Penguatan Akuntabilitas

Dalam hal pengelolaan dana publik, pemerintah daerah dapat dievaluasi menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh akuntansi sektor publik. Laporan keuangan yang tepat dan audit independen menjamin bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran publik.

3. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Dalam hal mengelola keuangan, pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat besar dari akuntansi sektor publik. Dengan melakukan analisis pada laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menemukan bidang yang perlu diperbaiki dan membuat keputusan yang tepat untuk memaksimalkan penggunaan anggaran.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah daerah mampu menyediakan layanan publik berkualitas tinggi ketika keuangannya dikelola secara efisien dan bertanggung jawab.

5. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Pilihan kebijakan yang lebih baik dapat dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan pelaporan keuangan yang akurat dan komprehensif.

6. Penyusunan Anggaran yang Lebih Presisi

Akuntansi sektor publik menyediakan data yang akurat mengenai pendapatan, pengeluaran, dan aset pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk merumuskan anggaran yang lebih tepat dan realistis.

7. Pengendalian Risiko Keuangan

Akuntansi sektor publik juga memfasilitasi pemerintah daerah dalam mengenali dan mengelola risiko keuangan yang mungkin terjadi.

8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Penerapan akuntansi sektor publik memerlukan peningkatan kapasitas SDM di tingkat pemerintahan daerah, baik dalam pengetahuan akuntansi maupun penggunaan sistem informasi akuntansi.

9. Pengembangan Infrastruktur Teknologi

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi sektor publik yang efisien, pemerintah daerah perlu mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti sistem informasi akuntansi keuangan daerah (SIKAD) yang terintegrasi.

Dengan demikian, akuntansi sektor publik merupakan fondasi penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, *akuntabel*, efisien, dan berintegritas.

Dinamika Implementasi SAP Akrual di pemerintah daerah

Berdasarkan hasil kajian literatur, keberhasilan implementasi SAP akrual sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak tempat kerja tidak memiliki karyawan akuntansi yang mahir dalam akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Beberapa bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) masih belajar administrasi umum, bukan akuntansi atau keuangan publik. Hal ini menyebabkan laporan yang tertunda, kesalahan pencatatan, dan penggunaan informasi keuangan yang tidak efektif dalam pengambilan keputusan (Prayogo, Fikri, and Nandini, 2023).

b. Kesiapan Sistem Informasi

Pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan dengan akrual memerlukan sistem informasi akuntansi yang kuat dan saling terhubung. Pemerintah daerah yang tidak dilengkapi dengan

teknologi yang memadai sering kali menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang menggunakan sistem akrual. Di sejumlah wilayah, pemanfaatan aplikasi seperti SIMDA Keuangan belum mencapai tingkat yang diharapkan, baik karena terbatasnya fitur yang disediakan maupun kurangnya pelatihan bagi pengguna (BPKP, 2021). Komitmen Pimpinan dan Budaya Organisasi Pelaksanaan akrual memerlukan dukungan serta komitmen dari para pemimpin daerah. Apabila kepala daerah atau kepala SKPD tidak memahami dan menganggap penting kualitas laporan keuangan, maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan berlangsung secara administratif saja dan hanya sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan.

c. Pengawasan dan Insentif

Peran lembaga pengawasan seperti Inspektorat dan BPK sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Temuan berulang dari BPK seringkali mencerminkan kurangnya tindak lanjut pada saran dari audit. Selain itu, tidak adanya sistem insentif yang berdasarkan kinerja keuangan membuat semangat daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan menjadi rendah. Sistem akuntansi yang berlandaskan akrual memerlukan dukungan teknologi informasi yang cukup. Namun, masih ada batasan dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan akses internet di banyak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Idris and Syachbrani, 2022) di Bali menunjukkan bahwa dua hambatan utama dalam penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah kurangnya pemahaman SDM dan minimnya pelatihan.

Inovasi dan Transformasi Digital dalam Akuntansi Publik Daerah

Transformasi digital muncul sebagai respon terhadap tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang efisien. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan terintegrasi. Dalam konteks ini, inovasi teknologi menjadi alat strategis yang mampu mempercepat dan menyederhanakan proses-proses tersebut.

Salah satu bentuk transformasi digital yang paling nyata adalah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan dalam satu platform berbasis digital (Safari, Putri, and Ernayani 2024). Dengan SIPD, pemerintah daerah tidak perlu lagi menggunakan banyak aplikasi yang terpisah-pisah, sehingga mencegah duplikasi data dan mempercepat alur informasi. Selain SIPD, beberapa daerah juga mengembangkan aplikasi keuangan berbasis lokal seperti SIMDA Keuangan, e-Budgeting, dan e-Reporting untuk mendukung transparansi internal dan eksternal.

Transformasi ini juga menyentuh pada penggunaan teknologi cloud computing, big data, dan *artificial intelligence* (AI) untuk analisis keuangan secara lebih prediktif dan efisien. Contohnya, dengan big data, pemerintah daerah dapat melakukan analisis tren belanja dan pendapatan dari tahun ke tahun, mengidentifikasi potensi pemborosan, serta merancang kebijakan anggaran berbasis bukti (*evidence-based budgeting*). Bahkan, beberapa daerah mulai menggunakan dashboard keuangan digital yang memungkinkan pimpinan daerah memantau realisasi anggaran secara

real-time, termasuk progres fisik dan keuangan dari setiap program atau kegiatan.

Tak hanya untuk internal pemerintahan, inovasi digital juga berdampak pada peningkatan akuntabilitas publik. Dengan sistem pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses masyarakat melalui situs resmi atau aplikasi publik, masyarakat bisa turut mengawasi penggunaan APBD. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat bahkan sudah memanfaatkan aplikasi open data keuangan sebagai bentuk keterbukaan anggaran kepada publik.

Namun demikian, proses transformasi digital ini tidak lepas dari tantangan. Tantangan utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi, resistensi birokrasi terhadap perubahan, dan ketimpangan infrastruktur TIK antar daerah (Susanti, Yolandasari, and Meilani, 2024). Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi, dan dukungan anggaran untuk digitalisasi menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi ini.

Secara keseluruhan, inovasi dan transformasi digital dalam akuntansi publik daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga menjadi pendorong utama reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan yang lebih baik. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih modern, daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Perbandingan Praktik di Beberapa Daerah

Perbandingan Praktik Inovasi dan Transformasi Digital Akuntansi Publik di Beberapa Daerah menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki pendekatan dan capaian yang berbeda dalam menerapkan digitalisasi pengelolaan keuangan. Keberhasilan atau keterlambatan suatu daerah dalam transformasi ini

umumnya dipengaruhi oleh komitmen kepala daerah, kapasitas SDM, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi.

Salah satu contoh yang menonjol adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta telah lama menerapkan sistem e-Budgeting, e-Planning, dan *e-Monev* (monitoring dan evaluasi) untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan secara digital. Melalui aplikasi-aplikasi tersebut, DKI Jakarta mampu menyajikan data anggaran secara terbuka kepada publik dalam portal Jakarta Open Data, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi APBD. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Jakarta terhadap prinsip *good governance* dan transparansi fiskal.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan sistem digital yang cukup komprehensif bernama Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan). Sistem ini terintegrasi dengan aplikasi Sapa Warga dan e-Sakip, sehingga memungkinkan pelaporan dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara *real-time*, serta memberikan akses kepada warga untuk memberi masukan terhadap program daerah. Selain itu, Pemprov Jabar juga memanfaatkan big data analytics untuk mengevaluasi efektivitas belanja publik dan mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

Berbeda dengan dua provinsi besar tersebut, daerah seperti Kabupaten Banyuwangi juga menunjukkan kemajuan signifikan meskipun dengan sumber daya yang lebih terbatas. Banyuwangi memanfaatkan sistem *e-Village Budgeting*, yaitu aplikasi yang memungkinkan transparansi pengelolaan dana desa berbasis digital. Praktik ini berhasil menekan penyimpangan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Selain itu, Banyuwangi memanfaatkan dashboard visualisasi anggaran sebagai alat kontrol pimpinan daerah terhadap kinerja keuangan setiap unit kerja.

Namun, tidak semua daerah mengalami kemajuan yang sama. Di beberapa kabupaten di wilayah timur Indonesia, transformasi digital masih menghadapi hambatan besar, seperti keterbatasan jaringan internet, minimnya SDM yang melek teknologi, dan belum optimalnya dukungan regulasi lokal. Di daerah-daerah ini, implementasi aplikasi seperti SIPD masih berjalan secara parsial, dan pencatatan keuangan sering kali masih dilakukan secara manual atau semi-digital, sehingga berisiko menimbulkan keterlambatan dan kesalahan laporan. Di sisi lain, wilayah-wilayah di Indonesia Timur seperti NTT dan Papua seringkali menemui kendala berupa kurangnya infrastruktur serta akses terhadap pelatihan. Penelitian yang dilakukan oleh (Syafitri, 2022) menunjukkan bahwa faktor geografis dan rendahnya kemampuan fiskal semakin menyulitkan daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai jadwal.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi terdapat arah kebijakan nasional yang sama yakni mendorong digitalisasi akuntansi publik tingkat implementasi dan hasilnya sangat bervariasi. Daerah yang mampu menggabungkan kepemimpinan yang kuat, penguasaan teknologi, serta komitmen terhadap keterbukaan, cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan sistem digital secara utuh. Sebaliknya, daerah yang menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan perlu mendapatkan dukungan intensif dari pemerintah pusat agar tidak tertinggal dalam transformasi digital yang bersifat nasional ini.

Tantangan Dalam Penerapan Akuntansi Sektor Publik Di Daerah

Penerapan akuntansi sektor publik di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi, maupun budaya birokrasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya

manusia (SDM) yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Banyak daerah, terutama yang berada di wilayah tertinggal dan terpencil, masih kekurangan tenaga profesional yang memahami secara mendalam prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Rajagukguk et al. 2025). Dalam banyak kasus, pencatatan keuangan dilakukan oleh pegawai administrasi umum yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan kualitas laporan keuangan yang rendah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi kendala serius.

Penerapan sistem informasi keuangan daerah, seperti SIPD dan SIMDA, membutuhkan jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, serta sistem keamanan data yang baik. Sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses terhadap fasilitas tersebut, sehingga proses digitalisasi keuangan berjalan lambat atau bahkan stagnan. Ketimpangan infrastruktur ini menghambat efisiensi kerja serta integrasi data antar-perangkat daerah, padahal sistem terintegrasi sangat dibutuhkan dalam akuntansi sektor publik modern.

Tantangan berikutnya adalah kompleksitas regulasi dan perubahan kebijakan yang kerap terjadi. Pemerintah pusat sering mengeluarkan peraturan atau pembaruan kebijakan keuangan daerah yang menuntut penyesuaian cepat di tingkat daerah. Namun, kesiapan daerah dalam menyesuaikan diri tidak selalu memadai, baik dari sisi SDM maupun sistem yang digunakan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan standar yang ditetapkan, yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Aspek kultural juga menjadi penghambat serius. Banyak aparatur daerah yang masih menunjukkan resistensi terhadap perubahan, terutama terhadap sistem digital dan transparansi keuangan. Transformasi digital dianggap sebagai beban tambahan atau bahkan ancaman bagi mereka

yang terbiasa dengan sistem manual yang longgar dalam pengawasan. Sikap birokratis ini menyebabkan lambannya proses adopsi teknologi dan rendahnya partisipasi aktif dalam perbaikan tata kelola keuangan.

Tak kalah penting adalah kurangnya komitmen dari pimpinan daerah. Implementasi akuntansi sektor publik yang baik membutuhkan dukungan penuh dari kepala daerah dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan arahan strategis. Namun dalam praktiknya, masih ada daerah yang menganggap pelaporan keuangan hanya sebagai kewajiban administratif tahunan, bukan sebagai alat manajemen dan pertanggungjawaban publik. Akibatnya, program pelatihan SDM, pengembangan sistem, dan pengawasan internal sering kali diabaikan atau dikerjakan seadanya.

Terakhir, sistem pengawasan dan evaluasi yang belum optimal juga turut menjadi kendala. Meskipun terdapat lembaga pengawas seperti BPK dan APIP, hasil audit yang mereka berikan tidak selalu ditindaklanjuti secara serius. Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran atau temuan akuntansi menyebabkan rendahnya efek jera dan lemahnya budaya akuntabilitas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas keuangan daerah.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menegaskan bahwa penerapan akuntansi sektor publik di daerah membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan regulasi dan sistem informasi, melainkan juga harus diiringi dengan penguatan kapasitas SDM, reformasi budaya birokrasi, pembangunan infrastruktur teknologi, serta komitmen kuat dari pimpinan daerah untuk menjadikan akuntansi sebagai pondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Akuntabilitas

Menurut (Rusrina, 2021) Mereka yang

bertanggung jawab atas suatu organisasi memiliki kewajiban untuk menjelaskan atau menanggapi pertanyaan tentang kinerja organisasi tersebut yang diajukan oleh mereka yang memiliki hak hukum untuk menuntut rincian tersebut. Sedangkan menurut (Gurendrawati et al. 2024) Pihak yang melaksanakan amanat (agen) bertanggung jawab kepada publik apabila ia menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala hal yang menjadi kewajiban agen kepada pihak yang memberikan amanat (prinsipal) yang berwenang menuntut hal tersebut.

Untuk menerapkan akuntabilitas di lembaga pemerintah, prinsip-prinsip berikut ini harus diperhatikan (LAN, 2000):

- 1) Kepemimpinan dan staf lembaga telah berjanji untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab dalam praktik manajemen misi mereka.
- 2) Sangat penting untuk memiliki mekanisme yang menjamin penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara legal.
- 3) Anda harus dapat membuktikan seberapa jauh Anda telah mencapai tujuan. Hasil, serta realisasi visi dan tujuan, harus menjadi pusat perhatian.
- 4) Sebagai agen perubahan dalam manajemen lembaga pemerintah, Anda harus terus terang, tidak memihak, terbuka, dan kreatif dalam pendekatan Anda untuk mewujudkan pembaruan teknis, pengakuan kinerja, dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Indikator Akuntabilitas Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shafratunnisa pada tahun 2015, akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa aspek berikut:

- 1) Realisasi sasaran dalam pengelolaan anggaran pada sektor publik
- 2) Partisipasi pemerintah dalam pengelolaan anggaran sektor publik
- 3) Adanya pengawasan dari tim pelaksana

4) Tersedianya laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran sektor publik

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan sistematis mengenai perkembangan akuntansi sektor publik untuk pengelolaan anggaran daerah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa peralihan dari sistem akuntansi kas menjadi akrual melalui implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah memberikan efek yang signifikan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SAP yang berbasis akrual tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat mekanisme tanggung jawab publik serta pengawasan terhadap pemanfaatan dana masyarakat.

Namun, pelaksanaan akuntansi di sektor publik pada tingkat pemerintah daerah tetap menghadapi berbagai kendala. Masalah utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi publik, ketidakmerataan infrastruktur teknologi informasi, serta ketahanan terhadap perubahan dalam lingkungan birokrasi. Selain itu, praktik akuntansi sektor publik di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek nominal dan administratif, sementara pemanfaatan akuntansi sebagai alat manajerial dan strategi pengembangan daerah belum berjalan dengan optimal. Penggabungan elemen keberlanjutan dan digitalisasi dalam sistem akuntansi publik juga masih menjadi kekurangan yang perlu diperbaiki di masa mendatang.

Secara keseluruhan, perkembangan akuntansi di sektor publik menjadi instrumen utama untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan efisien. Praktik

akuntansi yang baik di sektor publik memungkinkan pemerintah daerah untuk menemukan program-program yang kurang efisien, meningkatkan mutu layanan publik, serta memperkuat rasa percaya masyarakat dan investor terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akuntansi di sektor publik berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

5. REFERENSI

- Basri, Yesi Mutia. 2021. "Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah." *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6 (1): 13.
- Briando, Bobby. 2021. "Akuntansi Sektor Publik Dalam Potret Khazanah Budaya Melayu." *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 3 (2): 56–71. <https://doi.org/10.34199/oh.v3i2.40>.
- Gurendrawati, Ety, I Gusti Ketut Agung Ulupui, S E Hera Khairunnisa, M Ak, Gentiga Muhammad Zairin, and M Ak SE. 2024. *Akuntansi Sektor Publik*. Bumi Aksara.
- Idris, Hariany, and Warka Syachbrani. 2022. "Penerapan Basis Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 1 (1): 8–13.
- Jupri Berutu, Ahmad, Ardianto Pranata, and Milfa Yetri. 2022. "Proses Sistem Irigasi Pada Lahan Jagung Berbasis Arduino." *Jurnal Sistem Komputer Triguna Dharma (JURSIK TGD)* 1 (3): 81–86. <https://doi.org/10.53513/jursik.v1i3.5278>.
- Karlina, Neneng, Trisna Sary Lewaru, and Dwi Kriswantini. 2023. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku." *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 1 (3).
- Kewo, Cecilia Lelly. 2024. *Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik, Teori Dan Aplikasi*. CV. AZKA PUSTAKA.

- Khafifah, Ainun, Haliah Haliah, Nirwana Nirwana, and Muh Alief Fahdal Imran Oemar. 2020. "Model Implementasi Dan Problematika Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Fraud Di Era Digital." *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi* 5 (4): 252–62. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i4.385>.
- Martadinata, Sudrajat. 2023. "MEMAHAMI SUASANA DILEMATIS ANTARA HUTAN DAN UANG MELALUI SEMIOTIKA AKUNTANSI." *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3 (2): 203–14. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1400>.
0. 2024. "Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Global* 2 (6): 620–24.
- Prayogo, Youdhi, Atar Satria Fikri, and Khairunnisa Puti Nandini. 2023. "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah." *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi* 3 (2): 44–58.
- Putri, Angel Novita, and Retnosari Retnosari. 2023. "Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital." *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* 12 (1): 99–102.
- Rajagukguk, Grace P Johana, Lestari Simanjuntak, Maria Grace Octa Viani Pane, Hendra Harmain, and Hamidah Hamidah. 2025. "Evolusi Teori Akuntansi Sektor Publik: Analisis Perkembangan Dan Tantangan Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 3 (1): 21–28.
- Rusrina, Ririn. 2021. "Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
- Safari, M Dedy Eko Trisyono, P A Andiena Nindya Putri, and Rihfenti Ernayani. 2024. "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 10 (5): 3036–40.
- Shafitri, Amandha, Mely Nur Ratman, Annisa Putri Jufani, Siti Wela Aliza, and Wahjoe Pangestoeti. 2025. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas APBN Dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Pendekatan Studi Literatur." *Hikamatzu/ Journal of Multidisciplinary* 2 (1).
- Susanti, Evi, Hagmy Nurma Yolandasari, and Putri Meilani. 2024. "Implementasi Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada Instansi Pemerintah." *Bulletin of Community Engagement* 4 (3): 165–80.
- Syafitri, Renanda Agna Devita. 2022. "Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kepatuhan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL."
- Yogi Pranata. 2024. "PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN IMPLEMENTASI INDONESIA." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 1 (3): 29–34. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.473>.